



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

I. DATA PRIBADI

- Nama : **TRIONO JUNOASMONO**
- Jabatan : **DIREKTUR JALAN BEBAS HAMBATAN**
- NHK : **656483**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	7.448.725.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.208.125.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.240.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	155.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOBIL, VOLKSWAGEN KODOK Tahun 1961, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000		
3. MOBIL, VOLKSWAGEN KODOK Tahun 1974, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	300.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	8.017.999.975
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.639.924.633
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	19.561.649.608
III. HUTANG	Rp.	1.593.775.556
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.967.874.052

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.